



## Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Sistem Pengendalian Internal, Dan Kinerja Pemerintah Daerah terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan (Suatu Kajian Studi Literatur Manajemen Keuangan Daerah)

Sonya Atrisa Mantika<sup>1</sup>, Henny A. Manafe<sup>2</sup>, M.E. Perseveranda<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Indonesia, email: [sonyamantika69@gmail.com](mailto:sonyamantika69@gmail.com)

<sup>2</sup> Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Indonesia, email: [hennyunwira@gmail.com](mailto:hennyunwira@gmail.com)

<sup>3</sup> Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Indonesia, email: [perseverandaerse@gmail.com](mailto:perseverandaerse@gmail.com)

**Korespondensi Penulis: Sonya Atrisa Mantika**

**Abstract:** Previous research and relevant research are very useful for a research or literature review of a scientific work both examining the influence between variables and other factors that also influence a variable itself. This article discusses a literature review of factors that have an impact on financial reporting accountability, namely fiscal decentralization, internal control systems, and local government performance. This article is designed by the author in order to be able to determine hypotheses that have an impact on each variable and can be used for further articles or research. The results of this study are: 1) Fiscal decentralization has a positive and significant impact on the accountability of financial statements; 2) The internal control system has a positive or crucial influence on the accountability of financial statements; 3) Local government performance has a positive and crucial impact on the accountability of financial reports; 4) Fiscal decentralization, internal control systems and local government performance simultaneously have a positive and crucial impact on financial reporting accountability.

**Keywords:** Accountability of Financial Statements, Fiscal Decentralization, Internal Control Systems, Local Government Performance.

**Abstrak:** Penelitian terdahulu maupun penelitian yang relevan sangat berguna terhadap suatu penelitian maupun kajian pustak suatu karya ilmiah baik mengkaji tentang pengaruh antar variabel maupun faktor lain yang turut mempengaruhi suatu variabel itu sendiri. Artikel ini Membahas tentang suatu kajian pustaka faktor yang berdampak pada pertanggungjawaban laporan keuangan, yakni desentralisasi fiskal, sistem pengendalian internal, dan kinerja pemerintah daerah. Artikel ini penulis rancang agar bisa menentukan hipotesis yang berdampak bagi tiap variabel dan mampu dimanfaatkan bagi artikel atau riset selanjutnya. Hasil kajian ini, yaitu: 1) Desentralisasi fiskal berdampak positif maupun bermakna pada

akuntabilitas laporan keuangan; 2) Sistem pengendalian internal mempengaruhi positif maupun krusial bagi pertanggungjawaban laporan keuangan; 3) Kinerja pemerintah daerah berdampak positif maupun krusial bagi akuntabilitas laporan keuangan; 4) Desentralisasi fiskal, sistem pengendalian internal maupun kinerja pemerintah daerah berdampak positif maupun krusial secara simultan bagi akuntabilitas laporan keuangan.

**Kata Kunci:** Akuntabilitas Laporan Keuangan, Desentralisasi Fiskal, Sistem Pengendalian Internal, Kinerja Pemerintah Daerah

## PENDAHULUAN

Usaha pemerintah dalam memeratakan dan mencapai tujuan tata kelola keuangan diserahkan ke pemerintah daerah agar bisa menjalankan urusan pemerintahan secara optimal. Hal itu dilaksanakan demi mencapai pemerataan di bermacam daerah, maka bisa mempertanggungjawabkan semua penyelenggaraan pemerintahan sebagai wujud melaksanakan otonomi daerah berlandaskan prinsip pertanggungjawaban (Wicaksono, 2015).

Revitalisasi yang pemerintah upayakan bermaksud agar dapat memangkas jarak atau mampu mempercepat penerapan teknologi sekarang ini (Muhammad Rivandi, 2022). Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban bila suatu lembaga atau pemerintah daerah mampu menjelaskan segala sesuatu ke masyarakat terkait kewajiban penggunaan keuangan (Oktaviani et al., 2020). Pemerintah daerah diminta agar mampu memaksimalkan pertanggungjawaban dalam mengelola dan melaporkan keuangan pemerintahannya. Secara ideal, Idealnya desentralisasi fiskal mampu memaksimalkan efektivitas, efisiensi, keterbukaan, dan pertanggungjawaban dalam mengelola keuangan pemerintah (Moisiu, 2013).

Sesuai hasil audit BPK ke bermacam pernyataan dari pakar pemeriksa laporan keuangan, menyebut bila laporan keuangan pemerintah, seperti WTP (wajar tanpa pengecualian), makin baik proses pengauditan, berarti kian baik tingkat pertanggungjawaban keuangannya. Hanya saja, opini audit berwujud WTP ini termasuk tidak baik sebab tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah selaku pengelola pun belum benar-benar seratus persen, yaitu melalui kinerja selama tahun anggaran berjalan (Muraiya & Nadirsyah, 2018). Desentralisasi fiskal turut andil dalam pertumbuhan di sektor perekonomian daerah. Pertumbuhan ini terpengaruh oleh desentralisasi fiskal yang memberikan peluang ke setiap daerah agar mampu menciptakan kemandirian demi memperoleh penghasilan masing-masing. Pertanggungjawaban dalam laporan keuangan, perwujudan kemandirian terhadap keuangan daerah sudah didesentralisasi karena pemerintah daerah mempergunakan kekuasaannya selaku pengelola keuangan dan sebagai unsur pelaksana dari kepentingan masyarakat (Muraiya & Nadirsyah, 2018). Kian tinggi kebergantungan ke pemerintah daerah, kian kecil peluang daerah itu mampu mempunyai pertanggungjawaban laporan keuangan yang tinggi berbentuk opini audit (Fontanella et al., 2014).

Desentralisasi di Indonesia sejak tahun 2001, lalu penyelenggaraannya dimulai dengan menyempurnakan tatanan politik terhadap Undang-Undang No. 22 tahun 1999, berganti menjadi Undang-Undang No. 32 tahun 2004 mengenai pemerintah daerah dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 berganti menjadi Undang-Undang No. 33 tahun 2004 mengenai sumber pendapatan daerah. Upaya ini disertai oleh kemunculan otonomi daerah yang menjadi pemberlakuan desentralisasi fiskal (Mujiati & Purbasari, 2014).

Liu (2007) memaparkan bila desentralisasi fiskal sebagai peran penggunaan keuangan untuk berbelanja dan sumber penghasilan pemerintah daerah. Kondisi tersebut menjadi dinamika di pemerintah karena berupaya sebagai perbaikan dan pengembangan negara atau transisi di sektor perekonomian. Pelaksanaan desentralisasi fiskal mewajibkan pemerintah

daerah agar bisa mengelola daerah masing-masing melalui pengalokasian belanja berdasar pada pendapatan/penghasilannya, yang mempertegas bila pemerintah daerah perlu menggali potensi sumber daya di wilayah mereka. Sesuai Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, desentralisasi ialah bentuk pemberian kewenangan pemerintah pusat ke pemerintah daerah agar bisa mengatur maupun mengelola urusan pemerintah pada sistem Indonesia

Kesuksesan selama menerapkan otonomi daerah ditunjang oleh capaian kerja pemerintah secara teratur dan bertanggung jawab atas tata kelola keuangan (Saragih & Siregar, 2020). Kinerja pemerintah daerah meningkat atau menurun, termasuk informasi terkait aset akan tersampaikan pada laporan perwujudan anggaran dan neraca. Capaian kerja pemerintah daerah dinilai melalui bermacam pembangunan atau kebutuhan lain, serta meningkat atau menurunnya pendapatan dari beragam wilayah.

Sesuai uraian yang sudah tersampaikan, rumusan permasalahan dalam riset ini guna menentukan hipotesis, seperti:

1. Apakah desentralisasi fiskal berdampak positif maupun bermakna terhadap akuntabilitas laporan keuangan?
2. Apakah sistem pengendalian internal memengaruhi positif maupun krusial bagi akuntabilitas laporan keuangan?
3. Apakah kinerja pemerintah daerah memengaruhi positif maupun krusial bagi akuntabilitas laporan keuangan?

Apakah desentralisasi fiskal, sistem pengendalian internal ataupun kinerja pemerintah daerah memengaruhi positif maupun krusial secara simultan bagi akuntabilitas laporan keuangan?

## **METODE**

Prosedur menuliskan artikel ini ialah mempergunakan prosedur kualitatif dan kajian pustaka. Menganalisis teori dan keterkaitan antarvariabel melalui buku maupun jurnal secara luring di perpustakaan maupun daring yang diperoleh melalui Mendeley, Scholar Google maupun media daring lain. Pada kajian kualitatif, maka kajian pustaka perlu dipergunakan secara konsisten dengan hipotesis metodologis. Dengan kata lain, perlu dipergunakan secara induktif agar tidak mengarahkan pertanyaan yang peneliti ajukan. Dasar penting dalam melangsungkan kajian kualitatif, yakni kajian itu sifatnya eksploratif, (Ali & Limakrisna, 2013).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Desentralisasi Fiskal Memengaruhi Akuntabilitas Laporan Keuangan**

Bawono (2015) memaparkan bila desentralisasi fiskal di Indonesia diawali semenjak pemberlakuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 berperan sebagai unsur terpenting bagi desentralisasi. Bawono (2015) memaparkan bila peraturan tersebut mengubah secara mendasar bagi pemerintah daerah dengan menyertakan transaksi akuntabilitas maupun keuangan dari pusat ke daerah.

Mujiati dan Purbasari (2015) memaparkan bila awalnya pemerintah Indonesia menggunakan sistem pemerintahan sentralistik. Melalui sistem pemerintahan itu, pemerintah daerah tanpa mampu terlibat secara aktif untuk mengembangkan daerah mereka. Melalui keberadaan hambatan itu, maka pemerintah merancang dalam mengimplementasikan otonomi daerah dengan maksud agar pengembangan daerah tetap memahami segala sesuatu yang diperlukan oleh daerah masing-masing, serta bisa mempergunakan potensi daerah dalam memaksimalkan penghasilan asli daerah.

Guna melaksanakan otonomi daerah, daerah diharuskan untuk memberi informasi ke pemilik kepentingan sehingga pemerintah harus mempunyai standar akuntansi keuangan pemerintah daerah yang layak, kendati lingkungan akuntansi pemerintah cukup rumit. Hanya

saja, faktor ini merupakan tantangan pemerintah agar bisa mengimplementasikan sistem akuntansi (Mardiasmo, 2009). Guna menerapkan kehendak pemangku kepentingan terkait informasi pemerintah daerah, memerlukan upaya mengembangkan dan menerapkan sistem akuntabilitas secara jelas, terperinci, dan sesuai target, maka pelaksanaan pemerintah maupun pembangunan bisa terlaksana secara maksimal, bersih, dan terbebas dari tindakan KKN (Sedarmanti, 2012).

Mimba, et al (2007) memaparkan bila desentralisasi merupakan tren baru di seluruh negara, serta desentralisasi terkhusus fiskal merupakan unsur yang vital untuk mereformasi di bidang publik, terutama bagi negara berkembang. Hanya saja, organisasi bidang publik ini mengalami situasi yang tidak berimbang antara permintaan dan penawaran terhadap informasi kinerja.

Desentralisasi fiskal berdampak positif dan krusial bagi pertanggungjawaban laporan keuangan. Penjelasan ini sama seperti kajian milik W Nurmuthmainnah (2020), memperjelas bila desentralisasi fiskal pada pertanggungjawaban laporan keuangan memperlihatkan pengaruh signifikan. Kajian milik R Friyani (2017) mempertegas desentralisasi fiskal berpengaruh secara signifikan bagi pertanggungjawaban keuangan Pemerintah Daerah Kota Jambi.

### **Sistem Pengendalian Internal Memengaruhi Akuntabilitas Laporan Keuangan**

Sistem pengendalian internal sesuai penuturan IAPI (2011:319.2) merupakan tahap yang terlaksana oleh dewan komisaris, manajemen maupun unsur lainnya yang dirancang agar bisa memberi rasa yakin terkait perolehan pada keandalan dalam laporan keuangan, efektivitas maupun efisiensi operasional dan ketaatan hukum dan aturan yang diberlakukan.

Mulyati et al (2011) mengkaji kesalahan dalam penyajian akuntansi berdasar SPI di Kab. Bojonegoro, yang bertanggung jawab guna merancang dan melaksanakan pengendalian mengenai catatan keuangan, memberi keyakinan bila laporan keuangan sudah berdasar pada SAP, serta memberi keyakinan secara layak mengenai keamanan aktiva yang berimbang material bagi laporan keuangan. Melalui pelaporan LHP selama tiga tahun, tepatnya sejak 2007 hingga 2009, memperlihatkan bila kelemahan SPI dari tiap tahun kian mengalami pengurangan pada 2007, yang memperlihatkan ada sepuluh kelemahan SPD dan bersifat material. Lalu, pada 2009 terdapat enam kelemahan SPI yang sifatnya tidak material sebab kesalahan dalam mencatat tidak tersengaja,

Sistem pengendalian internal berdampak positif maupun krusial bagi akuntabilitas laporan keuangan sudah dikaji beberapa peneliti sebelumnya, seperti M Sari (2020) yang memperlihatkan bila sistem pengendalian internal berdampak signifikan bagi akuntabilitas laporan keuangan. Begitu pula dengan M Ichlas, H Basri, M Arfan (2014) mengemukakan bila sistem pengendalian internal secara bersamaan memengaruhi bermakna bagi pertanggungjawaban laporan keuangan.

### **Kinerja Pemerintah Daerah Berdampak pada Akuntabilitas Laporan Keuangan**

Halim dan Kusufi (2012) memaparkan bila sistem dalam mengukur bidang publik ialah sistem yang bermaksud guna memberi bantuan bagi manajer dalam penilaian atas kinerja strategi dengan indikator kinerja keuangan maupun nonkeuangan. Penentuan kinerja di bidang publik di dunia sudah mengalami perkembangan pesat semenjak diperkenalkan di Amerika Serikat pada medio 1940-an. Perkembangan itu pun tersebar ke semua negara di dunia berkat program dari organisasi internasional semacam PBB, World Bank, dan IMF (Bawono, 2015).

Beberapa negara berkembang kebutuhan untuk mengukur kinerja dan informasi kinerja turut berkembang. Kondisi ini diakibatkan kapasitas lembaga yang rendah dan tingkat korupsi tergolong tinggi sehingga kebutuhan itu tidak disertai oleh ketersediaan dari informasi kinerja

yang memperlihatkan kedudukan kebutuhan sehingga terasa tidak memuaskan (Mimba, et al, 2007).

Pengukuran kinerja berkembang sejak Indonesia memberlakukan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 terkait LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan) yang menilai capaian kerja lain berwujud LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah) maupun LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban). Pengukuran kinerja yang berkembang ini memberi kesempatan bagi daerah guna memperlihatkan diri mereka sebagai wilayah terbaik di Indonesia (Bawono, 2015).

Fontanelle dan Rossieta (2014), sesuai kajian Lin (2010), mempertegas bila kinerja pemerintah daerah berhubungan positif dengan pertanggungjawaban laporan keuangan. Dengan begitu, makin baik opini kinerja yang diserahkan, maka kian tinggi peluang wilayah itu berakuntabilitas laporan yang tinggi pula.

### **Desentralisasi Fiskal, Sistem Pengendalian Internal, Dan Kinerja Pemerintah Daerah Berdampak pada Akuntabilitas Laporan Keuangan**

Fontanella dan Rossieta (2014) mendapati bila desentralisasi fiskal berbentuk tingkat kemandirian dan capaian kerja dalam menyelenggarakan pemerintahan berdampak positif bagi peluang pertanggungjawaban laporan keuangan pemerintah daerah yang tinggi. Mudhohar dan Tahar (2016) mempertegas jika kemandirian daerah berdampak positif bagi laporan keuangan sebab melalui kemandirian tinggi, maka bisa mendanai laporan keuangan, maka mampu mendanai belanja daerah dan bisa menjadikan daerah itu untuk bertanggung jawab atas laporan bermacam kegiatannya. Sesuai penuturan itu, memperjelas bila desentralisasi fiskal berpengaruh positif bagi pertanggungjawaban laporan keuangan pemerintah daerah.

Pengendalian internal ialah perencanaan, tata cara, dan kebijakan yang dirancang oleh manajemen agar menjamin secara layak terhadap pencapaian efektivitas operasional, kredibilitas laporan keuangan, pengamanan aset, kepatuhan kepada perundang-undangan, kebijakan maupun aturan lainnya. Struktur untuk mengendalikan sektor internal meliputi lima unsur mendasar pada kebijakan dan tata cara yang terancang maupun dipergunakan oleh manajemen guna meyakinkan bila tujuan pengendalian bisa terpenuhi. Kepentingan auditor berupa upaya mencegah dan mendeteksi salah penyajian pada laporan keuangan. Selama merencanakan pengauditan, auditor perlu mendapat pemahaman yang layak terhadap unsur dalam mengendalikan internal guna mereancang pengauditan melalui pelaksanaan tata cara demi menelaah rancangan pengendalian yang sesuai untuk menyusun laporan keuangan.

Sistem pengendalian intern berdampak bagi pertanggungjawaban pelaporan keuangan atau kian sedikit temuan SPI yang diperoleh, berarti pertanggungjawaban laporan keuangan kian membaik. Sama seperti riset milik Ramon (2014), menyebut bila variabel sistem dalam mengendalikan secara internal mampu memaksimalkan pertanggungjawaban laporan keuangan di Inspektorat Kota seprovinsi Sumatra Barat, dengan thitung 9,618 di batas ttabel sejumlah 1,670.

Kinerja berdampak cukup penting dan positif terhadap pertanggungjawaban laporan keuangan yang pemerintah daerah hasilkan. Riset itu memperjelas bila pelaksanaan pemerintahan daerah berpeluang untuk mempunyai pertanggungjawaban laporan keuangan. Capaian kerja berupa bentuk tindakan yang pemerintah dapatkan sehingga capaian kerja harus diukur. Keberadaan pengukuran ini akan sesuai dengan respons baik sehingga memunculkan tindakan perbaikan berkesinambungan demi memperoleh tujuan di masa mendatang (Bastian, 2016).

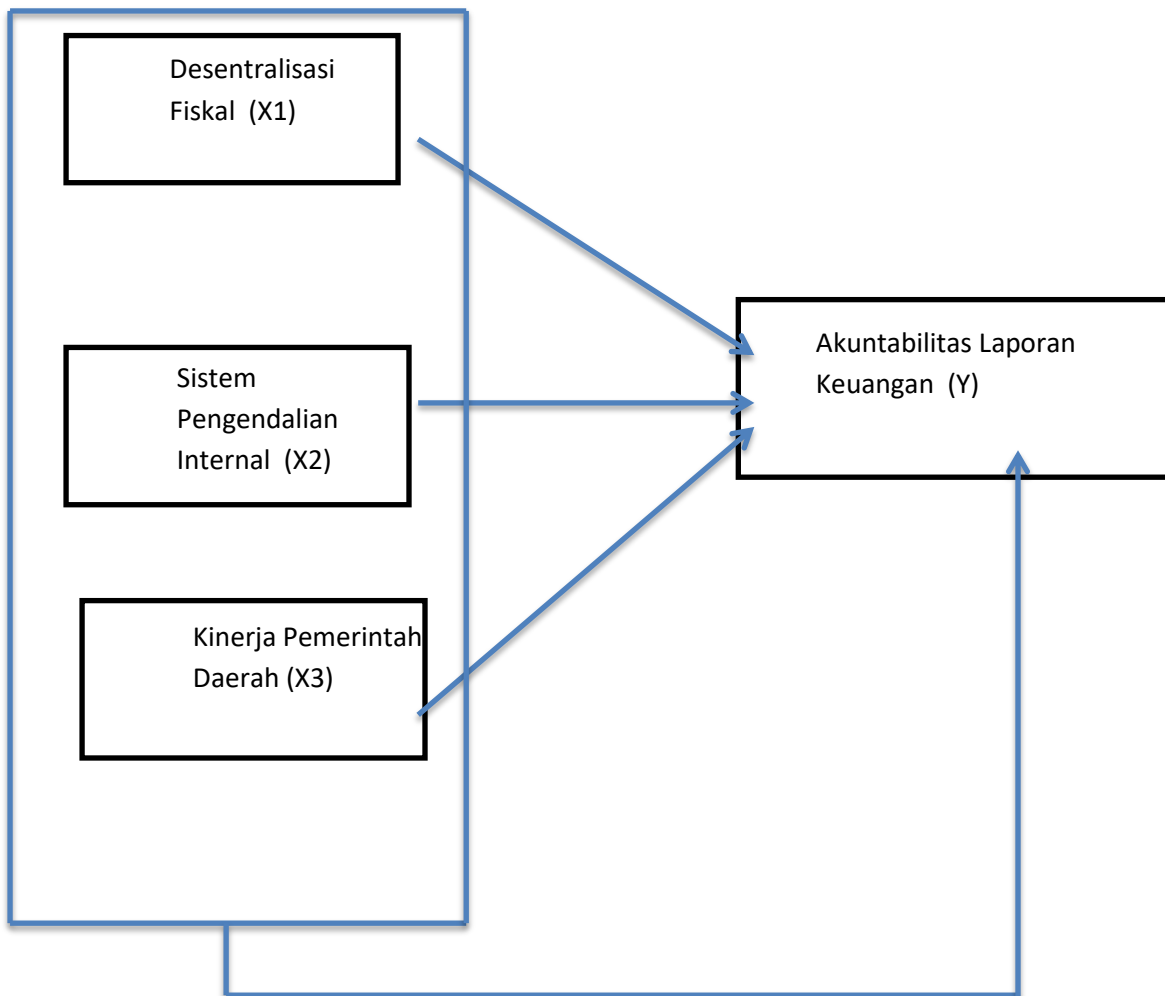
Kinerja merepresentasikan efektivitas, efisiensi, produktivitas maupun penghematan pemerintah daerah. Kajian milik Riza, B.S (2015) memperjelas bila sistem pengukuran kinerja yang baik menggambarkan fokus pemerintah daerah guna menerapkan pemerintahan

yang baik (Mudhofar & Tahar, 2016) mampu bermanfaat seperti perencanaan kinerja (Riza, B. S., 2015). Pertanggungjawaban laporan keuangan pemerintah daerah terjadi peningkatan bila capaian kerja keuangan yang didapat pemerintah daerah pun terjadi peningkatan. Perihal itu memperlihatkan bila capaian kerja pemerintah daerah terjadi peningkatan terkait layanan ke masyarakat.

Sesuai pemaparan tersebut, memperjelas bila desentralisasi fiskal, sistem pengendalian internal dan kinerja keuangan daerah berdampak positif maupun krusial bagi akuntabilitas laporan keuangan. Sama seperti kajian H Purbasari, ADB Bawono, (2017), yang memberikan kesimpulan jika variabel secara simultan desentralisasi fiskal, pengendalian internal, kinerja pemerintah daerah memengaruhi bermakna bagi pertanggungjawaban laporan keuangan. Kajian milik W Nurmuthmainnah (2020) memberi kesimpulan bila variabel secara simultan desentralisasi fiskal memengaruhi bermakna bagi pertanggungjawaban laporan keuangan pemerintah daerah.

### Kerangka Pemikiran Teoritis

Sesuai uraian yang sudah tersampaikan, maka didapat kerangka berpikir seperti:



Berdasar gambar di atas, maka desentralisasi fiskal, sistem pengendalian internal maupun kinerja pemerintah daerah berdampak bagi pertanggungjawaban laporan keuangan secara terpisah atau bersamaan. Terkecuali variabel desentralisasi fiskal, sistem pengendalian internal dan kinerja pemerintah daerah yang berdampak pada akuntabilitas laporan keuangan,

masih terdapat variabel yang turut memengaruhinya, seperti: kemandirian daerah (X4), efisiensi dan efektifitas penyerapan anggaran (X5), kompleksitas (X6)

## KESIMPULAN

Sesuai uraian yang sudah dilaksanakan, maka rumusan hipotesisnya ialah:

1. Desentralisasi fiskal berdampak positif maupun krusial pada pertanggungjawaban laporan keuangan.
2. Sistem pengendalian internal berdampak positif maupun krusial pada pertanggungjawaban laporan keuangan.
3. Kinerja pemerintah daerah berdampak positif maupun krusial pada pertanggungjawaban laporan keuangan.
4. Desentralisasi fiskal, sistem pengendalian internal, dan kinerja pemerintah daerah berdampak positif maupun krusial pada pertanggungjawaban laporan keuangan.

## REFERENSI

- Fontanella, A., Padang, P. N., & Rossieta, H. (2014). *Pengaruh Desentralisasi Fiskal dan Kinerja Terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*.
- Mudhofar, K., & Tahar, A. (2016). Pengaruh Desentralisasi Fiskal dan Kinerja Terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia: Efek Moderasi dari Kinerja. *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, 17(2), 176–185. <https://doi.org/10.18196/jai.2016.0053.176-185>
- Muraiya, & Nadirsyah. (2018). Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Efisiensi dan Efektivitas Penyerapan Anggaran Terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 3(2), 236–253
- Oktaviani, M. A., Sari, D. P., Akuntansi, P., Katolik, U., & Mandala, W. (2020). *Pengaruh Kemandirian Daerah, Kinerja Pemerintah Daerah dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan*. 21(1), 186–193.
- Purbasari, H., & Bawono, A. D. B. (2017). Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Sistem Pengendalian Internal Dan Kinerja Pemerintah Daerah Terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan. *Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 2(2), 102–108. <https://doi.org/10.23917/reaksi.v2i2.4884>
- Saragih, F., & Siregar, I. A. (2020). Analisis Rasio Keuangan dalam Menilai Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota Tebing. *Seminar of Social Sciences Engineering & Humaniora*, 1–14.
- Syahrudin. (2006). *Desentralisasi Fiskal: Perlu Penyempurnaan Kebijakan Dan Implementasi yang Konsisten*. Universitas Andalas
- Wicaksono, K. W. (2015). Akuntabilitas Organisasi Sektor Publik. *JKAP (Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik)*, 19(1), 17. <https://doi.org/10.22146/jkap.7523>